

**PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENGATASI
KEMISKINAN DI GAMPONG LEUHAN KECAMATAN
JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Negara**

Oleh

MAISARAH SARTIKA
1705905010119



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 19 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MAISARAH SARTIKA
NIM : 1705905010119

Dengan judul : Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan
di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,

Pembimbing

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si

NIDN: 0101107101

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua
Program Studi Administrasi Negara

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Fadhil Ilhamsyah, M.Si
NIDN. 0017109101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH ACEH BARAT**

Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 19 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MAISARAH SARTIKA
NIM : 1705905010119

Dengan judul : Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan
di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk lulus.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si
2. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
3. Anggota : Nodi Marefanda, M.A.P

Ketua Program Studi
Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN. 0017109101

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAISARAH SARTIKA

NIM : 1705905010119

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar tulisan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya akan bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan orisinilitas skripsi ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Meulaboh, 19 Juli 2021

MAISARAH SARTIKA
NIM: 1705905010119

ABSTRAK

Maisarah Sartika. NIM: 1705905010119. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Dibawah bimbingan Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si.

Permasalahan kemiskinan pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikannya perlu solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintahan gampong dalam mengatasi kemiskinan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan gampong dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di Gampong Leuhan masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) bagian yaitu peran pemerintahan gampong sebagai inovator, peran pemerintahan gampong sebagai fasilitator dan peran pemerintahan gampong sebagai motivator. Adapun terkait upaya yang dilakukan Pemerintahan Gampong Leuhan dalam rangka menanggulangi kemiskinan masyarakat yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG) Makmue Beusare dengan pengawasan Pemerintahan Gampong Leuhan.

Kata Kunci: *Peran, Kemiskinan, Inovator, Fasilitator, Motivator.*

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

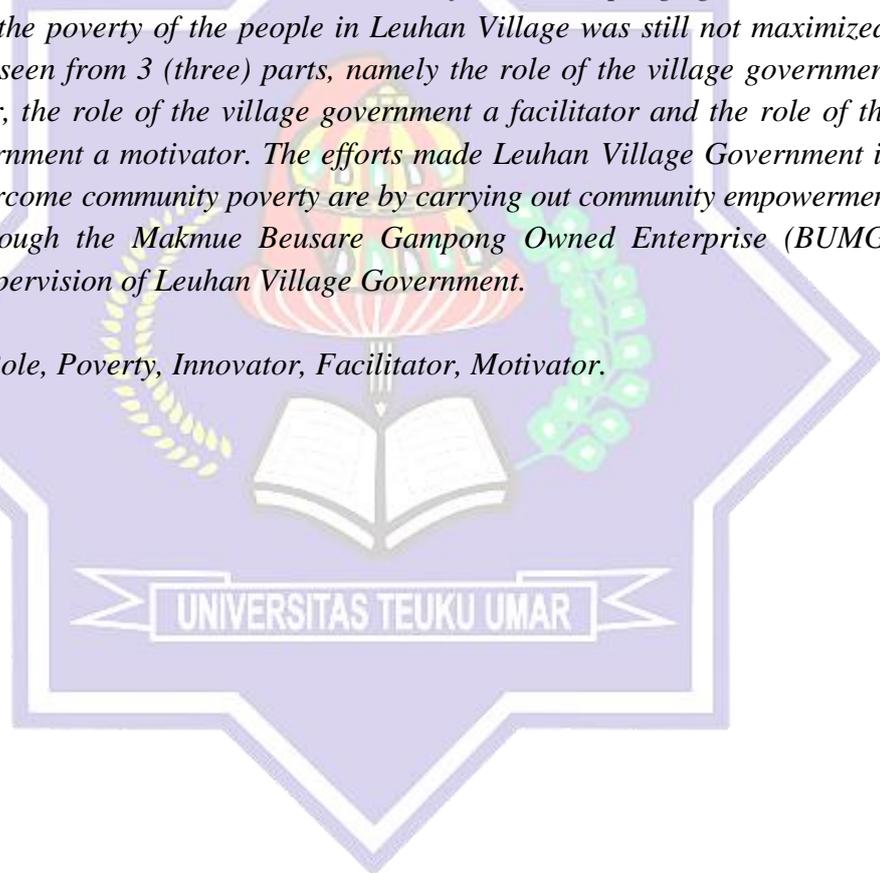
ABSTRACT

Maisarah Sartika. NIM: 1705905010119. The Role of Village Government in Overcoming Poverty in Leuhan Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. Under guidance Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si.

The problem of poverty in society is a multidimensional problem, so to solve it, a comprehensive solution is needed. Therefore, it is necessary to know the root of the problem that causes the occurrence of community poverty. The purpose of this study was to determine the role of village government in overcoming poverty and the efforts made by the government in overcoming poverty in Leuhan Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency.

The results showed that the role of the Gampong government in overcoming the poverty of the people in Leuhan Village was still not maximized. This can be seen from 3 (three) parts, namely the role of the village government an innovator, the role of the village government a facilitator and the role of the village government a motivator. The efforts made Leuhan Village Government in order to overcome community poverty are by carrying out community empowerment activities through the Makmue Beusare Gampong Owned Enterprise (BUMG) under the supervision of Leuhan Village Government.

Keywords: Role, Poverty, Innovator, Facilitator, Motivator.



BIODATA PENULIS

I. Identitas Penulis:

Nama : Maisarah Sartika

Tempat/Tgl.Lahir : Leuhan/ 01 Mei 1997

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Golongan Darah : O

Status Kawin : Belum Menikah

Alamat : Desa Leuhan Dusun Putro Ijo Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat.

Nomor Kontak : 0822 7662 0322

Email : maisrhrtk157@gmail.com

II. Pendidikan Formal

2006 - 2011 : SD Negeri 12 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

2011 - 2014 : SMP Bina Generasi Bangsa Kabupaten Aceh Barat

2014 - 2017 : SMA Negeri 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

2017 - 2021 : Universitas Teuku Umar

Alue Penyareng, 19 Juli 2021

Maisarah Sartika



PERSEMBAHAN

Bismillah Hirahmanirahim

Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah

Sujud dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, atas izin Allah yang telah memberikanku kesehatan, kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan untukku.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tuaku ayahanda Hasbi dan Ibundaku Sitinah serta seluruh keluarga besarku. Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, perhatian, dan kebaikan yang telah kalian berikan untukku.

Ayahanda dan Ibunda dan tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Kepada adik-adikku tersayang Munalisa, Agustina, Feby Bati Syahila dan keluarga besar yang saya sayangi. Terimakasih atas segala motivasi dan kasih sayang yang telah kalian berikan untukku. Terimakasih untuk kalian semua yang sangat teristimewa dalam hidupku, terimakasih atas doa-doa yang telah membuatku semangat untuk melewati semua ini.

Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 atas motivasi, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama-sama yang sangat berkesan untukku serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian penyelesaian skripsi ini Tiada kata yang bisaku kupersembahkan untuk kalian melainkan kata terimakasih.

Maisarah Sartika



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas kuasa Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang dada kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan tulus, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

- 1) Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayanda dan ibundaku tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Bapak Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 3) Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'aruf SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

- 4) Bapak Basri, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- 5) Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- 6) Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh
- 7) Sahabat-sahabat Maisarah Sartika, Irma Lisa, Nuril Aina, Fitria Munawarah. Dan terimakasih kepada Hermanto yang selalu memberikan saya motivasi, nasehat dan dukungannya untuk cepat menyelesaikan skripsi
- 8) Kawan-kawan di Program Studi Administrasi Negara angkatan 2017 beserta seluruh Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu bersama disaat kuliah.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah Swt dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Meulaboh, 19 Juli 2021
Penulis

Maisarah Sartika

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BIODATA PENULIS	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kemiskinan Masyarakat	11
2.2.1. Pengertian Kemiskinan	11
2.2.2. Jenis, Penyebab dan Dimensi Kemiskinan	14
2.2.3. Indikator Kemiskinan Masyarakat	16
2.2.4. Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan.....	18
2.2.5. Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan.....	19
2.3. Teori Peran	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Metode Penelitian.....	25
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.2.1. Sumber Data.....	25
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3. Penentuan Informan	27
3.4. Instrumen Penelitian.....	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	28
3.6. Pengujian Kredibilitas Data	30

	3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN	32
	4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
	4.2. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.....	33
	4.2.1. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Inovator	33
	4.2.2. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Fasilitator	35
	4.2.3. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Motivator	37
	4.3. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	39
BAB V	PEMBAHASAN	46
	5.1. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.....	46
	5.1.1. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Inovator ..	46
	5.1.2. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Fasilitator	47
	5.1.3. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Motivator	48
	5.2. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	49
BAB V	PENUTUP	51
	6.1. Kesimpulan.....	51
	6.2. Saran.....	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan serta keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Kodobik, 2018).

Permasalahan kemiskinan masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikannya perlu solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan, tentu sangat terkait dengan masalah rendahnya sumberdaya manusia. Hal ini harus diakui, dikarenakan memang secara faktual sumberdaya manusia yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang belum memadai, rendahnya etos kerja masyarakat, pola hidup konsumtif yang terdapat pada masyarakat dan program pemerintah yang belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat (Suharto dalam Chandra, 2017).

Kemiskinan dapat membuat masyarakat tidak mampu untuk hidup layak dan memiliki aset baik berupa aset finansial maupun aset non finansial. Selanjutnya, banyak kasus pada keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan

perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak untuk menjadi penerima bantuan. Hal ini dikarenakan pada penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan (Setiawan, 2017). Lebih lanjut, kemiskinan menurut Tjoetra, dkk (2020, h. 1) bahwa kemiskinan sering diasosiasikan dengan desa, yang selanjutnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwasannya desa di Provinsi Aceh disebut dengan gampong.

Dengan demikian terkait kemiskinan masyarakat di gampong, menurut Khomsan, et all (2015, h. 11) bahwa pemerintah gampong diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Rosa dalam Tjoetra, dkk (2020, h. 2) juga menyatakan bahwa sebagai wakil dari negara, gampong wajib melakukan pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sebab masyarakat gampong memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui modal sosial dan potensi yang dimiliki gampong.

Upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis. Menurut Purnomo (2013, h. 3) kemiskinan merupakan suatu hal yang kompleks, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat satu segi saja. Kemudian, menurut Solikatun (2014), ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan. Pertama yaitu

program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, kedua adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran.

Pemerintahan gampong hendaklah berperan aktif, guna meningkatkan pembangunan terutama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban utama pemerintah gampong dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat gampong. Selain itu, menurut Yasa dalam Setiawan (2017) penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif, maka memungkinkan akan muncul proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses untuk merubah perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih mendasar, menguatkan komitmen bersama diantara masyarakat yang mana penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama.

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat, diantaranya adalah tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya aset desa yang dikuasai masyarakat pedesaan, pelayanan sarana dan prasarana pedesaan yang kurang memadai, terbatasnya kesempatan usaha dipedesaan, lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan lemahnya koordinasi dalam pembangunan pedesaan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat guna, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah gampong dalam menanggulangi kemiskinan (Suryanto, 2006, h. 2).

Permasalahan kemiskinan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan di atas, juga dijumpai pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk di gampong Leuhan yaitu berjumlah 4.320 jiwa terdiri dari 2.027 jiwa penduduk laki-laki dan 2.293 penduduk perempuan beserta jumlah rumah tangga mencapai 1.306 rumah tangga. Dilihat dari segi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat Gampong Leuhan, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Keuchik Gampong Leuhan menunjukkan terdapat 448 penduduk di dalam rumah tangga Gampong Leuhan yang termasuk kategori tidak sejahtera atau sebanyak 10,3 %. Terkait dengan kondisi masyarakat yang berada dalam kemiskinan tersebut, bahwasannya telah ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan-bantuan sosial diantaranya sebanyak 250 jiwa mendapatkan bantuan PKH dan 198 jiwa mendapat bantuan BLT sebesar Rp 300.000 per bulan.

Adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong berada dalam kemiskinan tersebut, tidak lepas dari adanya peran pemerintah Gampong Leuhan yang memperhatikan masalah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang masih serba kekurangan tersebut. Namun demikian, peran pemerintah gampong Leuhan tersebut, dari wawancara awal yang penulis lakukan terhadap sebagian kecil masyarakat diketahui masih belum optimal. Hal ini diketahui dari masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi rendahnya kesejahteraan yang mana saat ini peran pemerintah gampong masih belum dirasakan masyarakat miskin secara menyeluruh. Dengan demikian, jika pemerintah Gampong Leuhan tidak mengantisipasi permasalahan tersebut, maka pengentasaan kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan tidak akan terlaksana dengan baik, dikarenakan

peran gampong yang belum sepenuhnya berperan mengajak masyarakat, sebab jika hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, berupa bantuan sosial melalui PKH dan BLT akan sulit menyelesaikan kemiskinan karena pemerintah gampong masih belum berperan sebagai inovator, fasilitator dan motivator.

Berdasarkan uraian penjelasan masalah terkait dengan kemiskinan yang terdapat pada masyarakat di Gampong Leuhan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi studi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu administrasi negara dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi ilmiah bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan pada lokasi penelitian yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi unsur Pemerintahan Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dalam memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan masalah kemiskinan masyarakat dan dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terdapat pada masyarakat Gampong Leuhan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, konsep kemiskinan, konsep kesejahteraan dan teori-teori lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data, dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi atau tempat penelitian, hasil mengenai peran pemerintahan Gampong Leuhan dalam mengatasi kemiskinan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

BAB V Pembahasan, yang terdiri dari pembahasan peran pemerintah Gampong Leuhan dalam mengatasi kemiskinan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintahan gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amar (2013) dalam penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat”. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh upah minimum regional, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan bagaimana perkembangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan yaitu (a) upah minimum regional berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat, sehingga para pengambil kebijakan diharapkan untuk berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat di mana pengangguran di Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pertumbuhan dari pada ekonomi juga turut berpengaruh terhadap masyarakat. (b) Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat meskipun belum signifikan, tetapi telah menunjukkan penurunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Mokoginta (2015) berjudul “Peran Pemerintah Desa Mengurangi Angka Kemiskinan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu (a) mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Ayula mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (b) faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan (c) upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya (a) peran pemerintah desa dalam mengurangi angka kemiskinan sudah dilaksanakan dengan baik, peran yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembangunan desa dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat (b) faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain faktor internal yakni kemalasan, di mana masyarakat hanya mengharapkan pekerjaan yang ada tanpa mencari pekerjaan lain, sedangkan faktor eksternal adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat sulit mencari pekerjaan dan kurangnya lapangan kerja (c) upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain pengembangan ekonomi kerakyatan dengan menyediakan program pemberdayaan usaha kecil pedesaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismoyo (2017) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Cangkol dan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Desa Cangkol. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Desa Cangkol diantaranya adanya faktor pengangguran, faktor ketidaktetapan pendapatan, faktor sosial lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor rasio ketergantungan penduduk, dan pemanfaatan sumber daya pertanian masih belum optimal. Adapun terkait peran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan

kemiskinan dilakukan dengan mengupayakan dan meningkatkan pembangunan pertanian, pembangunan masyarakat terpadu, perbaikan pangan dan pembangunan ketrampilan masyarakat serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kodoboik (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Angkringan”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Candirejo dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Angkringan dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program angkringan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam Program Angkringan di Desa Candirejo telah diwujudkan dengan peran fasilitator, dinamisator dan komunikator. Peran fasilitator telah dilakukan dengan membuat regulasi, melakukan bimbingan teknis dan memberikan bantuan peralatan dan permodalan. Peran dinamisator telah dilakukan dengan menggerakkan partisipasi dan motivasi masyarakat. Peran komunikator telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pengarahan dan membuka layanan pengaduan. Berkaitan dengan faktor pendorong dalam program angkringan telah berjalan dengan baik, karena program sesuai dengan potensi masyarakat lokal dan didukung banyak pihak, banyaknya pengangguran dalam usia produktif, monitoring yang terus-menerus. Sedangkan faktor penghambat program angkringan ini adalah kurangnya akses modal dagangan angkringan, sehingga sulit untuk mengembangkan dagangan dan tingkat motivasi yang rendah pada sebagian penerima program, sehingga sebagian dinilai tidak berkembang atau cenderung gagal

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana persamaan tersebut diantaranya adalah memfokuskan kajian mengenai peran pemerintah gampong dalam menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah terutama penelitian yang dilakukan Amar (2013) membahas secara luas kajian kemiskinan dilihat dari segi upah minimum, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat dengan analisis data secara kuantitatif. Penelitian yang dilakukan Mokoginta (2015) menambahkan pada pembahasannya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Ismoyo (2017) yang menambahkan pembahasan penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Kodoboik (2018) yang menambahkan pembahasan penelitian tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program angkeringan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Adapun penelitian yang penulis lakukan menambahkan pembahasan penelitian tentang upaya yang dilakukan pemerintah Gampong Leuhan dalam mengatasi kemiskinan masyarakat.

2.2. Kemiskinan Masyarakat

2.2.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi

masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Herlina dan Komariah, 2017). Masyarakat miskin, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), miskin dan hampir miskin (rentan terjadi miskin) (Anwas, 2013, h. 85). Selanjutnya Herlina dan Kamariah (2017) mengatakan bahwa kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilkan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilkan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, makna memadai disini sangat berbeda-beda melintas bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia Herlina dan Kamariah (2017).

Menurut Prayitno dan Lincoln beberapa aspek tentang kemiskinan dapat dirinci antara lain :

1. Bahwa kemiskinan itu multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi sosial, politik, dan

pengetahuan serta ketrampilan dan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

2. Bahwa aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
3. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif, dimana kita sering mendengar tentang kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan dan sebagainya namun ini bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi penduduk atau manusianya yang menderita tentang kemiskinan.

Berdasarkan uraian penjelasan yang dikemukakan di atas, maka berkaitan dengan pengertian kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah dikarenakan adanya suatu tingkat kekurangan materi pada segolongan masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Masalah kemiskinan juga bersifat multidimensi, di mana kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan bukanlah sebatas permasalahan ekonomi melainkan juga permasalahan sosial, karena menjadi persoalan yang mendasari munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat seperti rendahnya akses pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, peningkatan jumlah anak jalanan dan pengemis, serta meningkatnya tindak kriminal. Sehingga penanggulangan terhadap kemiskinan menjadi isu penting yang harus diperhatikan dan diupayakan secara berkesinambungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

2.2.2. Jenis, Penyebab dan Dimensi Kemiskinan

Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.

Adapun menurut Sumodiningrat (2009, h. 65) mengemukakan bahwasanya kemiskinan memiliki beberapa macam yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan absolut yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan ataupun jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif yaitu kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural yaitu kondisi masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

4. Kemsikinan struktural yaitu kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

Menurut Handayani dalam Herlina dan Kamariah (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dinilai sebagai sebab-sebab kemiskinan, yaitu (a) kesempatan kerja, dimana seseorang miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan maupun tahun (b) upah gaji dibawah minimum (c) produktivitas kerja yang rendah (d) ketiadaan aset (e) diskriminasi (f) tekanan harga dan (g) penjualan tanah. Menurut Kuncoro (2010, h.107) menjelaskan secara makro, kemiskinan muncul karena (a) adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. (b) kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas juga rendah sehingga berdampak pada upah yang rendah, dan (c) kemiskinan muncul sebab adanya perbedaan akses dan modal.

Adapun dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut, menurut Saefuddin, dkk (2013, h. 78) muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain:

1. Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya

kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses untuk mendapatkan informasi.

2. Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial.
3. Dimensi lingkungan, muncul dalam bentuk perilaku dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman.
4. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
5. Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan dan sebagainya.

2.2.3. Indikator Kemiskinan Masyarakat

Terdapat berbagai macam indikator yang dijadikan patokan dalam kriteria masyarakat tergolong miskin di Indonesia. Bappenas menjelaskan tentang indikator kemiskinan bahwa indikator ukuran miskin meliputi terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih dan lemahnya kepemilikan penguasaan tanah serta lain sebagainya.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan indikator-indikator kemiskinan, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari air tidak terlindung sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Pendapatan kepala rumah di bawah Rp 1.500.000 per bulan.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tamat sekolah dasar
13. Tidak memiliki aset yang mudah dijual.

Berdasarkan indikator-indikator kemiskinan di atas, maka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, terus meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro serta mensinergikan kebijakan dengan program penanggulangan kemiskinan.

2.2.4. Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara umum menjelaskan tujuan negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan

hukum bagi upaya mensejahterakan masyarakat sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur masalah kemiskinan, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya menanggulangi kemiskinan lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

2.2.5. Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk segera ditangani. Khususnya di wilayah perdesan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini akan tentu akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain yakni pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa (Suparlan, 2014, h. 9).

Hal ini dikarenakan dalam setiap komunitas masyarakat terdapat masalah-masalah yang tentunya harus mendapatkan solusi yang terbaik. Namun sebelum menemukan solusi yang terbaik, tentunya sangat dibutuhkan adanya kemampuan mengidentifikasi hal yang menjadi masalah dalam komunitas tertentu. Jika penyebabnya ada di dalam diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek

budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dapat mandiri. Dengan demikian langkah awal dari penanganan masalah yang ada di masyarakat adalah identifikasi masalah. Menurut pendapat Sumodiningrat (2013, h.25) bahwasannya sebagai suatu proses, maka penanganan masalah akan diawali oleh kegiatan identifikasi untuk menunjukkan keberadaan masalah tersebut.

Biasanya ketidakmampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan disebabkan oleh sikap acuh tak acuh (apati) masyarakat yang memandang pembangunan adalah tugas pemerintah bukan tugas masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Cara pandang inilah yang kemudian membuat masyarakat tidak merasa sebagai subyek pembangunan, sehingga masalah-masalah yang harusnya mampu diidentifikasi oleh masyarakat dan kemudian dicarikan solusinya bersama pemerintah bukanlah hal yang penting bagi masyarakat. Padahal melalui pembangunan desa yang ada di lingkungan mereka diharapkan mampu menggali persoalan-persoalan yang selama ini menghambat pembangunan masyarakat. Sudrajat juga menyatakan pentingnya identifikasi masalah dalam penanganan masalah juga tampak dari adanya kenyataan, bahwa tidak jarang masalah sosial tertentu sudah berlangsung dan terjadi dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat belum menyadari. Dengan demikian keberadaan masalah di dalam masyarakat tersebut bersifat tersembunyi (Sudrajat, 2010, h.2).

Karena sifatnya yang tersembunyi itulah, menyebabkan masalah tidak dapat ditangani dan seringkali menjadi persoalan yang menghambat pembangunan. Permasalahan komunitas merupakan kondisi yang tidak diharapkan, karena itu selalu membutuhkan tindakan guna melakukan perubahan dan perbaikan. Oleh

sebab itu kemampuan menemukan solusi dari permasalahan masyarakat adalah hal penting setelah dilakukan identifikasi masalah. Dengan melihat kenyataan dari persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat, maka dibutuhkan kemampuan menemukan solusi yang menjadi usaha untuk dapat mempercepat laju proses pembangunan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan, bahwa pemerintah desa menurut Sumodiningrat (2013, h.31) diharapkan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat merupakan sistem dan pola proses perubahan yang telah direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik dan non fisik melalui lembaga kemasyarakatan, dengan tujuan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Teori Peran

Menurut Soekanto (2013, h. 243) peran adalah norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Adapun menurut Narwoko (2014, h. 160) fungsi peran adalah sebagai memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma serta menghidupkan sistem kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat maupun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Menurut Hanif (2015, h 27) bahwa dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat, terdapat 3 (tiga) peran pemerintah desa, diantaranya yaitu sebagaimana dan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Menurut Taufiq (2010) bahwa inovator adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memberi pengertian kepada masyarakat dan mentransfer apa ia

ketahubtai, hal ini biasanya terjadi jika inoator masyarakat dan sebagai seorang agen perubahan, penyuluh harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada setiap masyarakat dan mengembangkan sistem kemasyarakatan yang bersifat inovatif.

Salah satu peran pemerintah desa yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat adalah peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti metode, program, sistim ataupun cara berpikir. Disamping itu, dalam mengefektifkan peranan pemerintah desa sebagai inovator, pemerintah desa selalu bekerjasama dengan seluruh anggota masyarakat dalam menyiapkan program pembangunan desa. Adapun bentuk kerjasama meliputi keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan program sampai pada evaluasi program pembangunan desa.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Menurut Nursalam dan Effendi (2008) bahwa fasiliatator merupakan individu atau kelompok yang memberikan bantuan guna memperlancar suatu program atau kegiatan sekelompok masyarakat, sehingga jalannya suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi segala hambatan atau meminimalisir hambatan. Fungsi sendiri diartikan sebagai perwujudan tugas dengan demikian fasilitator memiliki fungsi umum yaitu menjadi (*process guide*) pemandu proses, fasilitator menjadi pemandu jalannya proses diskusi mulai dari

merencanakan, mengawasi, membuat suasana yang akrab, memberikan arahan-arahan diskusi, memberikan bimbingan/berdiskusi dan mempunyai sikap yang netral, semua yang dilakukan fasilitator dengan tujuan agar jalannya proses dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil akhir yang baik. fasilitator tidak memposisikan dirinya sebagai penengah tetapi lebih kepada posisi netral karena tugas utama hanya membantu dari awal sebelum diskusi, proses diskusi hingga akhir diskusi sampai dengan mendapatkan hasil yang baik.

Terkait peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan harus dapat menjembatani kepentingan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sebagai fasilitator pemerintah desa harus bergerak dalam bidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

3. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Menurut Supriyono (2003) motivator adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Hal ini dikarenakan motivasi dari seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan dan instrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan. Stimuli eksternal mungkin dapat pula mempengaruhi motivasi tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Motivasi merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat internal dan eksternal yang membangkitkan untuk bertindak, mendorong untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dengan demikian, seorang motivator adalah mereka yang mampu membangkitkan orang lain untuk

bertindak mencapai tujuan tertentu, dan membuat orang lain tetap tertarik dalam kegiatan tertentu.

Terkait dengan peran pemerinah desa sebagai motivator artinya adalah menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan kemiskinan. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat akan menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan desa. Pemerintah desa selalu mendorong kami sebagai masyarakat untuk selalu ikut dalam melakukan control terhadap pembangunan desa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terkait dengan penelitian kualitatif, Moleong (2015, h. 43) berpendapat yaitu penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah untuk memecahkan suatu. Senada hal tersebut Sugiyono (2019, h. 3) juga menyatakan penelitian kualitatif digunakan secara ilmiah untuk memperoleh data-data primer yang akurat dalam upaya memahami permasalahan yang diteliti, yang mana menurut Creswell (2018, h. 127) bahwa masalah yang diteliti mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber penelitian sehingga perlu dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis untuk memberi gambaran secara menyeluruh dan mengungkap permasalahan yang terjadi terkait topik penelitian yang dilakukan.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dan berguna bagi peneliti dalam mengungkapkan perolehan data lapangan yang dipergunakan pada suatu penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Berkaitan dengan penjelasan observasi, bahwasannya Moleong (2015, h. 71) mengatakan bahwa observasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara mencatat dengan sistematis dan objektif atas kejadian atau perilaku suatu objek di lapangan penelitian.

2. Wawancara

Berkaitan dengan penjelasan wawancara, bahwasannya menurut Moleong (2015, h. 72) wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman yang sebelumnya telah disusun peneliti terhadap masalah-masalah yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan penelitian.

3. Dokumentasi

Berkaitan dengan penjelasan dokumentasi, menurut Moleong (2015, h. 73) dokumentasi adalah catatan-catatan atau dokumen tertulis yang sebelum sudah terkompilasi atau yang disusun sistematis oleh suatu instansi ataupun dokumen penelitian-penelitian terdahulu seperti jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar berguna untuk memperluas pembahasan teori yang relevan.

3.3. Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan peneliti agar pembaca mengetahui teknik apa yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Menurut Moleong (2015, h. 75) informan adalah narasumber atau orang-orang yang memberi informasi kepada peneliti mengenai masalah yang terdapat di lokasi penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan para informan penelitian, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong	1 Orang
2	Sekretaris Gampong	1 Orang
3	Ketua Tuha Peut	1 Orang
4	Masyarakat Miskin	6 Orang
	Jumlah	9 Orang

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen sering kali dipergunakan peneliti agar seorang peneliti memiliki fokus terhadap penelitian yang dilakukan sehingga penelitian hanya terbatas pada hal-hal yang tercakup dalam masalah yang diteliti sehingga membantu peneliti dalam mengumpulkan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Silalahi (2015, h.116) mengatakan bahwa instrumen merupakan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk memperoleh suatu data, yang menurut Arikunto (2018, h. 206) data tersebut merupakan catatan tertulis atau rekaman atas seluruh jawaban yang disampaikan narasumber ketika peneliti melakukan wawancara penelitian. Dengan demikian, dari pendapat yang disampaikan tersebut bahwa instrumen termasuk bagian penting dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara yang telah penulis siapkan dan susun secara sistematis guna memperoleh data-data penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif deskriptif sangat mengutamakan dan mengandalkan penggunaan kata-kata dibandingkan dengan angka-angka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dalam Moleong (2015, h.152) bahwa data yang akan dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumen yang diperoleh di lapangan penelitian dimana keseluruhan data-data tersebut harus disajikan secara sistematis agar orang lain yang membaca laporan penelitian mudah mengerti. Dalam studi penelitian kualitatif, analisis terhadap data penelitian dilakukan berdasarkan 3 (tiga) alur kegiatan diantaranya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagaimana lebih lanjut dijelaskan Milles dan Huberman dalam Silalahi (2015, h.339) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data penelitian dapat dijelaskan yakni sebagai proses memilih dan memilah data mentah dengan cara membuat ringkasan data-data mentah tersebut agar data penelitian yang diperoleh di lapangan seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi bermakna, setelah memilah data yang perlu dan data yang perlu disajikan. Sehingga tujuan adanya reduksi data adalah menampilkan data-data penelitian yang mampu memberikan gambaran secara spesifik mengenai jawaban atau mengungkapkan permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data-data yang telah dipilih sebagai data yang akan dianalisis, selanjutnya disajikan atau ditampilkan ke dalam laporan penelitian yang tersusun sistematis. Sajian data penelitian ini dapat berupa hasil observasi, wawancara dan dokumen yang telah dinarasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan adanya penyajian data ini, akan memudahkan pembaca dalam memahami arah permasalahan-permasalahan yang terjadi dan terdapat pada suatu penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Data-data yang disajikan pada laporan penelitian yang tersusun sistematis diperlukan adanya penarikan kesimpulan pada akhir sajian data penelitian yang ditampilkan. Sehingga dalam menarik kesimpulan ini diperlukan kecermatan bagi seorang peneliti dalam menganalisa data-data yang disajikan, sehingga didapatkan proposisi, sebab akibat dan konfigurasi yang menunjukkan suatu permasalahan benar-benar terjadi di lapangan penelitian.

3.6. Pengujian Kredibilitas Data

Kredibilitas data merupakan pengujian kehandalan data yang diperoleh di lapangan yang sangat penting diperhatikan dalam penelitian kualitatif, untuk melihat kebenaran atas temuan-temuan yang didapatkan. Pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2019, h. 199-122) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat dilakukan peneliti dengan cara kembali ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan lainnya atau membaca banyak studi literatur.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan peneliti dengan cara melakukan kajian kembali atas penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data-data yang telah diperoleh sudah tetap disajikan dalam hasil penelitian.

3. Triangulasi Teknik

Agar data-data penelitian lebih handal dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti dapat menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan melakukan studi observasi dan studi dokumentasi sebagai cara untuk memastikan kebenaran data wawancara penelitian yang diperoleh dari narasumber.

4. Analisis Data Kasus Negatif

Data kasus negatif merupakan tindakan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang bertentangan dari data hasil penelitian di lapangan, yang mana bila tidak ada perbedaan pada kedua data tersebut, maka hasil penelitian yang dilakukan telah handal dan dapat dipercaya.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Adapun jadwal penelitian mulai dari observasi lapangan sampai dengan penelitian ini dilakukan dilaksanakan dari Januari sampai dengan April tahun 2021, dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Waktu	Januari	Februari	Maret	April
1	Observasi lapangan	√			
2	Usulan penelitian	√			
3	Penulisan proposal		√		
4	Seminar proposal		√		
5	Pengumpulan data			√	
6	Pengolahan data			√	
7	Penulisan hasil			√	
8	Seminar hasil				√
9	Sidang skripsi				√

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Leuhan merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.320 jiwa terdiri dari 2.027 jiwa penduduk laki-laki dan 2.293 penduduk perempuan beserta jumlah rumah tangga mencapai 1.306 rumah tangga. Berdasarkan aspek geografisnya Gampong Leuhan memiliki batasan wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Gampong Pasi Jambu Kecamatan Kaway XVI, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lapang, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Rundeng dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Gampong Leuhan terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Raja Aceh, Dusun Leuhan Teungoh, Dusun Putro Ijo, Dusun Cot Sematang dan Dusun Blang Pancu yang mana masing-masing dusun tersebut dilihat dari perkembangan penduduknya tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Dusun dan Penduduk di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Raja Aceh	97	85	182
2	Dusun Leuhan Teungoh	250	283	533
3	Dusun Putro Ijo	368	361	729
4	Dusun Cit Sematang	639	645	1.284
5	Dusun Blang Pancu	673	919	1.592
	Total	2.027	2.293	4.320

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Leuhan (2020).

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari total penduduk Gampong Leuhan sebanyak 4.320 jiwa terdiri dari 2.027 jiwa penduduk laki-laki dan 2.293 jiwa penduduk perempuan diketahui Dusun Blang Pancu merupakan dusun yang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 1.592 jiwa terdiri dari 673 jiwa penduduk laki-laki dan 919 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan Dusun Raja Aceh merupakan dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 182 jiwa terdiri dari 97 jiwa penduduk laki-laki dan 85 jiwa penduduk perempuan.

4.2. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

4.2.1. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Inovator

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Sofian Rasyid selaku Keuchik Gampong Lauhan terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai inovator dalam pembuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Sofian Rasyid mengatakan sebagai berikut:

Secara umum, peran Pemerintah Gampong Leuhan sebagai inovator yakni menyusun berbagai program pemberdayaan melalui Badan Usaha Miliki Desa yang mana pada lembaga yang berada dibawah naungan gampong tersebut, disediakan anggaran yang berasal dari Dana Gampong untuk membiaya semua kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya inovasi yang demikian, sebenarnya pemerintah Gampong sudah turut ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan khususnya di tingkat Gampong Leuhan (Wawancara, 26 Juni 2021).

Tanggapan senada berkaitan dengan hal tersebut di atas, turut disampaikan oleh Atenari selaku Sekretaris Gampong Leuhan bahwa terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai inovator dalam pembuat perubahan dan menyiapkan

penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan, Atenari mengatakan sebagai berikut:

Umumnya peran daripada Pemerintah Gampong sebagai inovator dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan yaitu memfasilitas masyarakat melalui program yang dibuat Pemerintah Gampong seperti pendirian BUMD, memberikan bantuan-bantuan dan lain sebagainya yang diharapkan mampu mengurangi masalah kemiskinan pada masyarakat Gampong leuhan (Wawancara, 27 Juni 2021).

Senada dengan hasil wawancara mengenai peran pemerintah gampong sebagai inovator dalam pembuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan, Mahdi selaku Ketua Tuha Peut Gampong Leuhan mengatakan bahwa:

Peran inovator yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Gampong di dalam upaya-upaya menanggulangi kemiskinan adalah membuat program-program yang sifat meminimalkan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat miskin, beberapa program yang dibuat diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan BUMG Gampong Leuhan dan memberi bantuan tunai kepada masyarakat yang dilaksanakan langsung oleh aparat Gampong Leuhan (Wawancara, 28 Juni 2021).

Untuk mendukung informasi hasil wawancara di atas mengenai peran pemerintah gampong sebagai inovator dalam pembuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan, penulis turut mewawancarai informan dari masyarakat dengan jumlah 6 (enam) orang yaitu Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti yang dalam wawancara ini informan tersebut secara keseluruhan menyatakan bahwa “Pemerintah Gampong perannya sebagai inovator masih belum maksimal, karena dalam kegiatan ataupun program yang dilaksanakan masih belum efektif menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya

kecenderungan pemerintah yang masih pilih-pilih masyarakat tertentu yang akan diberdayakan oleh pemerintah gampong” (Wawancara, 29-30 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh para informan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah gampong sebagai inovator dalam membuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum optimal, dikarenakan menurut masyarakat bahwasannya dari berbagai kegiatan ataupun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Leuhan masih belum efektif menanggulangi masalah kemiskinan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Gampong Leuhan.

4.2.3. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Fasilitator

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Sofian Rasyid terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Peran Pemerintah Gampong Leuhan yang implementasinya dilaksanakan melalui oleh seluruh aparatur Gampong sebagai fasilitator adalah sebagai pendamping masyarakat miskin dan memberikan arahan pada masyarakat tersebut untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan Pemerintah Gampong guna menstabilkan ekonomi yang rendah sehingga masalah kemiskinan yang terdapat pada masyarakat di Gampong Leuhan sedikit demi sedikit dapat diminimalisir atau teratasi (Wawancara, 26 Juni 2021).

Senada dengan wawancara yang disampaikan di atas, bahwasannya terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, turut dikemukakan Atenaria yang dalam wawancara penelitian ini menyatakan bahwa:

Kondisi yang lebih kondusif mengenai masalah kemiskinan sebenarnya bisa dikatakan belum kondusif, karena hal tersebut pasti ada di setiap daerah manapun meskipun pihak Pemerintah Gampong sudah berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga terkait dengan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat di Gampong Leuhan, yang bisa dilakukan aparat gampong adalah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat miskin agar ketika mereka mendapat bantuan, bantuan tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan usaha yang bisa menunjang peningkatan ekonomi masyarakat miskin itu sendiri (Wawancara, 27 Juni 2021).

Dalam wawancara selanjutnya yang penulis telah lakukan terhadap Mahdi terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan, Mahdi mengatakan bahwa:

Dibilang kondusif masalah kemiskinan yang terdapat pada masyarakat ini sulit untuk dikondusifkan. Hanya saja peran Pemerintah Gampong Leuhan sebagai fasilitator ini terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan modal serta lain sebagainya (Wawancara, 28 Juni 2021).

Sedangkan dalam wawancara lebih lanjut terhadap para masyarakat yang berada di Gampong Leuhan diantaranya adalah Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti pada tanggal 29-30 Juni 2021 secara umum diperoleh informasi terkait dengan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator yaitu “menurut informan bahwasannya Pemerintah Gampong Leuhan masih kurang berperan dalam memperhatikan kondisi kemiskinan masyarakat sekarang ini. Hal ini diketahui dari pendampingan yang masih belum maksimal dilakukan

aparatur gampong dalam mengarahkan masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin yang selama ini telah menerima bantuan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh para informan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam membuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum optimal, dikarenakan aparatur Pemerintah Gampong Leuhan kurang memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama ketika masyarakat miskin tersebut memperoleh bantuan dari Pemerintah Gampong melalui BMUG, sehingga dengan tidak adanya pendampingan tersebut, menyebabkan masyarakat miskin tersebut tidak mengetahui manfaat dari bantuan tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

4.2.3. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Motivator

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai motivator dalam menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Sofian Rasyid mengatakan sebagai berikut:

Pemerintah Gampong Leuhan sebagai motivator adalah memberikan motivasi bagi seluruh masyarakat untuk giat dalam bekerja dan saling bantu membantu sesamanya, yang mana apabila terdapat masyarakat yang kesulitan dalam pekerjaannya tersebut seperti kekurangan modal usaha, maka masyarakat yang lain dapat membantunya atau bisa secara langsung dibicarakan kepada pihak aparatur Gampong Leuhan (Wawancara, 26 Juni 2021).

Dalam wawancara selanjutnya yang telah penulis lakukan kepada Atenaria berkaitan dengan masalah peran pemerintah desa sebagai motivator dalam upaya

menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan, diperoleh informasi sebagai berikut:

Secara umum, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong ketika menggerakkan masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan adalah masih terhambat pada rendahnya kesadaran masyarakat, meskipun dari pihak aparat gampong telah memberikan motivasi kepada masyarakat bersangkutan. Rendahnya kesadaran berakibat pada tidakdipergunakannya bantuan-bantuan yang telah disalurkan untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif agar masyarakat bersangkutan tersebut lebih mandiri dalam memenuhi kehidupan ekonominya (Wawancara, 27 Juni 2021).

Senada dengan wawancara yang disampaikan informan di atas berkaitan masalah peran pemerinah desa sebagai motivator dalam upaya menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan, juga dikemukakan oleh Mahdi yang mengatakan bahwa:

Menurut sepengetahuan saya terkait masaalah kendala-kendala yang ada dalam proses pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan sangat banyak karena sehingga penanggulangan kemiskinan itu sendiri sulit untuk diatasi sebab hal ini ada kaitannya dengan kesadaran masyarakat Gampong yang kurang mau menggunakan berbagai bantuan yang diberikan untuk kegiatan sifat produktif bukan konsumtif (Wawancara, 28 Juni 2021).

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan tersebut di atas, turut didukung oleh hasil wawancara penelitian dengan masyarakat terdiri dari Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti yang memberikan informasi secara umum bahwa “Pemerintah Gampong melalui aparaturnya masih sangat kurang memberikan motivasi kepada masyarakatnya, sehingga wajar saja kalau bantuan yang diterima masyarakat kebanyakan digunakan untuk konsumsi, karena masyarakat yang menerima bantuan ini tidak memiliki keterampilan dalam berwirausaha” (Wawancara, 29-30 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada informan penelitian di atas dapat diketahui bahwa peran pemerintah gampong sebagai motivator dalam membuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum optimal, dikarenakan Pemerintah Gampong Leuhan melalui aparturnya masih sangat kurang memberikan motivasi kepada masyarakatnya, sehingga dengan tidak adanya motivasi yang diberikan aparatur gampong tersebut, membuat kebanyakan daripada masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan-bantuan untuk menangani masalah kemiskinan, kurang memahami maksud atau tujuan bantuan tersebut diberikan kepada mereka.

4.3. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Sofian Rasyid terkait dengan bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan peran pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, menyatakan bahwa:

Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Gampong Leuhan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang terdapat pada masyarakat Gampong Leuhan. Upaya yang dilakukan tersebut antara lain Pemerintah Gampong Leuhan berperan aktif dalam mendata jumlah dari masyarakat miskin atau kurang sejahtera untuk dapat diberikan bantuan maupun pendampingan-pendampingan sebagai solusi utama mengeluarkan mereka dari permasalahan kemiskinan (Wawancara, 26 Juni 2021).

Senada dengan wawancara yang telah disampaikan tersebut di atas, terkait dengan bagaimana pendapat masyarakat terkait peran pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Atenaria mengatakan sebagai berikut:

Kalau dilihat dari berbagai informasi yang kami terima mengenai masalah pendapat masyarakat terkait dengan peran pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat tentunya berbeda-beda tergantung persepsi masing-masing, sebab ada yang menanggapi peran pemerintah sudah baik dan ada yang menanggapi belum, dimana informan mengenai peran yang belum baik ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Gampong dalam rangka menanggulangi kemiskinan pada masyarakat di Gampong Leuhan (Wawancara, 27 Juni 2021).

Dalam wawancara lainnya yang telah penulis lakukan terhadap Mahdi terkait dengan pendapat masyarakat terkait peran pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Pendapat masyarakat sangat relatif dan tanggapannya pun berbeda-beda, ada yang berpendapat positif dan ada pula yang berpendapat negatif. Sehingga dari berbagai pendapat masyarakat tersebut, menjadi sebuah kritik yang dapat membangun semangat dan motivasi aparatur Gampong Leuhan untuk bekerja yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wawancara, 28 Juni 2021).

Berbagai tanggapan yang telah disampaikan informan di atas, maka terkait dengan peran pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, informan dari masyarakat miskin yaitu Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti yang diwawancarai dalam penelitian ini berpendapat bahwa secara umum informan bersangkutan kurang puas atau peran yang telah dijalankan selama ini karena pada kenyataannya masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial baik itu bantuan PKH maupun BLT.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan para informan terkait dengan peran pemerintah Gampong dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah

Gampong Leuhan secara umum sudah menjalankan perannya sebagai inovator, fasilitator dan motivator bagi masyarakat Gampong. Meskipun pada praktiknya dalam menjalankan peran tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah gampong salah satu rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinanannya itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang penulis telah lakukan kepada Sofian Rasyid kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Gampong Leuhan dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Sofian Rasyid mengatakan sebagai berikut:

Mengenai kegiatan ada banyak mulai dari kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang pelaksanaannya ini dilakukan melalui Badan Usaha Milik Gampong meliputi kegiatan usaha memberi bantuan modal peternakan, modal usaha kios kecil-kecilan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat dengan pihak Badan Usaha Milik Gampong. Sedangkan kegiatan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan ini adalah ikut membantu masyarakat dengan menyalurkan berbagai bantuan dari Pemerintah mulai dari bantuan langsung tunai atau memberikan data-data masyarakat miskin kepada instansi terkait agar masyarakat yang ada di Gampong Leuhan memperoleh bantuan tunai seperti PKH, KIS dan BLT (Wawancara, 26 Juni 2021).

Adapun wawancara penelitian selanjutnya yang penulis lakukan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Gampong Leuhan dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, dikatakan oleh Atenaria sebagai berikut:

Umumnya sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Leuhan dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat, yang mana kegiatan pemberdayaan tersebut dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Gampong (Wawancara, 27 Juni 2021).

Sedangkan dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada Mahdi berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, hal ini adalah sebagai berikut:

Mengenai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat Gampong dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang kesemua kegiatan tersebut langsung dikelola oleh BUMG dibawah pengawasan pemerintah Gampong Leuhan (Wawancara, 28 Juni 2021).

Hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas, turut didukung oleh wawancara lebih lanjut yang penulis telah lakukan kepada Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, ditanggapi informan bahwa “secara umum para informan mengakui kegiatan pemberdayaan yang terdapat pada Gampong Leuhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut belum menjadi solusi penanggulangan kemiskinan masyarakat Gampong Leuhan “(Wawancara, 29-30 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Sofian Rasyid mengatakan bahwa:

Masalah kritikan dan saran sangat banyak kami dari masyarakat, karena kami selaku aparatur Gampong merupakan pusat daripada kritik dan saran masyarakat, kritikan dan saran ini ditujukan sebagai motivasi bagi aparatur gampong untuk terus bekerja dan berperan menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat terutama terkait dengan penyelesaian masalah kemiskinan (Wawancara, 26 Juni 2021).

Tanggapan senada terkait dengan kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat di Gampong Leuhan, turut disampaikan oleh Atenaria yang mengatakan bahwa:

Berbagai kritikan dan saran selama hal tersebut bersifat membangun dan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan masyarakat di Gampong Leuhan, akan diterima aparat demi perbaikan kinerja aparat Gampong Leuhan kedepannya. Hal ini tidak menjadi masalah dan bahkan penting adanya kritik dan saran dari masyarakat, agar aparat yang bekerja ini tidak salah sasaran apalagi hal tersebut berkaitan dengan kemiskinan yang terdapat pada masyarakat (Wawancara, 28 Juni 2021).

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan tersebut di atas, juga ditanggapi informan masyarakat seperti Sitinah, Nurlaila, Nuhayati, Cut Mala Sari, Nurjannah dan Ida Yanti yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwasannya “Kritik dan saran yang disampaikan kepada pemerintah Gampong masih belum sepenuhnya dikerjakan oleh aparturnya, terutama sekali berkaitan dengan masalah bantuan yang tidak tepat sasaran” (Wawancara, 29 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Sofian Rasyid terkait dengan kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong Leuhan dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Sofian Rasyid mengetakan sebagai berikut:

Kendala umum yang dihadapi Pemerintah Gampong Leuhan berkaitan upaya aparat Gampong Leuhan dalam menangani masalah kemiskinan adalah masyarakat terkadang sulit dibimbing sehingga ketika mereka itu diberikan bantuan, bantuan tersebut banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif atau digunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga bukan untuk modal usaha sebagai perbaikan daripada ekonomi bagi masyarakat miskin itu sendiri (Wawancara, 26 Juni 2021).

Dari wawancara lainnya terkait dengan kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong Leuhan dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat

Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dikatakan oleh Atenaria sebagai berikut:

Kendala umumnya adalah masalah masih kurangnya kemauan masyarakat untuk melanjutkan belajar akan keterampilan yang harus dimilikinya setelah yang bersangkutan memperoleh pemberdayaan. Selain itu, perilaku masyarakat yang bersifat konsumtif ketika mendapatkan bantuan menjadi hambatan bagi Pemerintah Gampong untuk membina masyarakat agar berperilaku produktif (Wawancara, 27 Juni 2021).

Senada dengan wawancara yang disampaikan informan di atas, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, juga disampaikan oleh Mahdi yang mengatakan bahwa:

Salah satu yang menjadi kendala utama bagi Pemerintah Gampong dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat adalah perilaku masyarakat yang masih konsumtif sehingga bilapun nanti mereka diberikan bantuan setelah diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan tersebut nantinya bukan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif (Wawancara, 28 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis telah lakukan kepada Sofian Rasyid berkaitan dengan langkah yang ditempuh pemerintah gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Sofian Rasyid adalah sebagai berikut:

Beberapa langkah atau hal yang sebelumnya memang telah dipersiapkan Pemerintah Gampong Leuhan dalam rangka menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan adalah memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh bantuan berupa BLT, PHK dan bantuan sembako yang mana bantuan tersebut telah merata diterima oleh masyarakat miskin pada tahun 2020 yang lalu dan pada tahun ini pun sebagian masyarakat miskin sudah menerima bantuan tersebut (Wawancara, 26 Juni 2021).

Wawancara lebih lanjut yang penulis lakukan kepada Atenaria berkaitan dengan langkah yang ditempuh pemerintah gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, diperoleh informasi bahwa:

Langkah yang ditempuh mulai dari tahap pemetaan, perencanaan serta penganggaran dana atau biaya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mana hal tersebut ditempuh Pemerintah Gampong melalui upaya mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sebagai lembaga yang berfungsi untuk menajalankan kegiatan pemberdayaan sekaligus sebagai lembaga yang bertugas menangani masalah kemiskinan masyarakat (Wawancara, 27 Juni 2021).

Tanggapan senada juga disampaikan oleh Mahdi bahwa terkait dengan langkah yang ditempuh oleh pemerintah gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan, Mahdi mengatakan:

Sudah banyak peran yang dilakukan Pemerintah Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat di Gampong Leuhan, diantaranya adalah mendirikan lembaga BUMG sebagai lembaga yang perannya untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui berbagai program ataupun kegiatan pemberdayaan yang selama ini dijalankan yang pelaksanaannya ini diawasi secara langsung oleh aparaturnya Pemerintah Gampong Leuhan (Wawancara, 28 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh para informan di atas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, secara umum menunjukkan upaya sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat ketika menyalurkan bantuan masih belum mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Gampong Leuhan.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

5.2.1. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Inovator

Peran Pemerintahan Gampong Leuhan berdasarkan hubungannya dengan kemiskinan pada masyarakat yang menjadi sasaran penggulangan kemiskinan sebagaimana penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa secara umum peran Pemerintah Gampong yang meliputi inovator masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakatnya, karena masyarakat setempat beranggapan bahwa selama ini Pemerintah Gampong Leuhan meskipun dalam penjelasannya telah berupaya menanggulangi masalah kemiskinan, tetapi upaya tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat miskin di Gampong Leuhan.

Hal tersebut dikatakan masyarakat dengan alasan, Pemerintah Gampong dalam pengentasan kemiskinan melalui program yang dilaksanakan masih belum sepenuhnya merata, terutama terkait dengan bantuan sosial hasil daripada pemberdayaan yang tidak semua masyarakat miskin menerimanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Gampong Leuhan untuk dapat memperhatikan kembali mengenai perannya sebagai inovator dalam penanggulangan kemiskinan sehingga seluruh kinerja yang selama ini dilakukan oleh aparat gampong untuk menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat menjadi lebih lancar dan dapat dipahami masyarakat.

Menurut Sriharini (2007, h. 42) bahwa kurangnya ketersediaan lapangan kerja sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan masih tingginya angka pengangguran masyarakat telah menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi. Selain masalah ekonomi juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kerawanan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, maka keberadaan masyarakat miskin pada tingkat Desa yang di dalam hal ini adalah Gampong Leuhan, sangat penting bagi Pemerintah Gampong Leuhan untuk dapat menjalankan perannya sebagai inovator. Karena dengan adanya peran tersebut, maka Pemerintah Gampong yang seyogyanya lebih dekat dengan kehidupan sosial masyarakat, sedikit demi sedikit mampu menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat.

5.2.2. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Fasilitator

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum optimal, dikarenakan aparatur Pemerintah Gampong Leuhan kurang memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama ketika masyarakat miskin tersebut memperoleh bantuan dari Pemerintah Gampong melalui BMUG, sehingga dengan tidakadanya pendampingan tersebut, menyebabkan masyarakat miskin tersebut tidak mengetahui manfaat dari bantuan tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Peran pemerintah Gampong Leuhan sebagai fasilitator di dalam menanggulangi masalah sangat diperlukan di Gampong Leuhan agar pencapaian sumber daya masyarakat yang terminimalisir

dari kemiskinan bisa terwujud nyata sekaligus masyarakat semakin mengerti akan pentingnya keluar dari masalah kemiskinan. Sebagai fasilitator Pemerintah Gampong sudah seharusnya memberikan pendampingan yang konsisten dan menyediakan fasilitas mislanya dengan mendirikan BUMG Makmue Beusare dengan tujuan menunjang masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan pemberdayaan sehingga dengan adanya pendampingan atas setiap program yang dijalankan pemerintah gampong, maka masyarakat akan lebih menjadi mengerti akan pentingnya manfaat pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Leuhan.

5.2.3. Peran Pemerintahan Gampong Leuhan Sebagai Motivator

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa peran pemerintah gampong Leuhan sebagai motivator dalam membuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan belum optimal, dikarenakan Pemerintah Gampong Leuhan melalui aparturnya masih kurang memberikan motivasi kepada masyarakatnya, sehingga dengan tidak adanya motivasi yang diberikan aparatur gampong tersebut, membuat kebanyakan daripada masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan-bantuan untuk menangani masalah kemiskinan, kurang memahami maksud atau tujuan bantuan tersebut diberikan kepada mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah Gampong Leuhan sebagai motivator sangatlah penting, sebab bila peran ini tidak diwujudkan secara optimal, maka sulit bagi Pemerintah Gampong Leuhan dalam meminimalisir permasalahan kemiskinaan. Peran ini harus pula diwujudkan melalui upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah mencari solusi permasalahan kemiskinan dengan melibatkan

masyarakat untuk merencanakan sesuatu program sehingga dalam menjalankan perannya sebagai motivator, maka Pemerintah Gampong Leuhan perlu dalam memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan kemasyarakatan demi penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada masyarakat Gampong Leuhan.

5.2. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Gampong dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan pada masyarakatnya adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya tersebut dikelola oleh BUMG Makmue Beusare dibawah pengawasan Pemerintahan Gampong Leuhan. Namun demikian, menurut penelitian yang sudah dilaksanakan ditemukan bahwa upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat miskin yang menggunakan bantuan dari hasil pemberdayaan untuk kegiatan konsumtif, yang seharusnya di pergunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Misalnya ketika masyarakat memperoleh bantuan BLT dari pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat melalui pendataan yang dilakukan Pemerintahan Gampong Leuhan, bahwa bantuan BLT sebesar Rp 300.000 yang diterima oleh masyarakat sebanyak 3 kali dalam setahun tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Demikian pula dengan bantuan-bantuan lainnya seperti PKH. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin sudah diupayakan oleh pemerintahan Gampong Leuhan untuk dibantu perekonomiannya baik melalui

bantuan dari Pemerintah Pusat maupun bantuan lain dari anggaran pemerintahab gampong yang sifat simpan pinjam yang dananya tersebut dikelola olh BUMG Makmue Beusare.

Menurut Bambang Sudibyo dalam Dewanta (2009, h.11) bahwa batasan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu. Tingkatan kemiskinan dinilai atau ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran materi, seperti: kondisi fisik dari bangunan atau lingkungan permukiman. Hal ini dikarenakan substansi kemiskinan merupakan kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar.

Kemiskinan masyarakat tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan yang tidak adil. Distribusi menjadi sangat buruk karena sistem dan kebijakan yang diambil tidak tepat. Sementara itu, masyarakat kaya dengan sejumlah modal yang dimilikinya mampu menambah kekayaannya dan mereka juga mampu memengaruhi para pengambil kebijakan, sehingga sebagian besar produk kebijakan yang diambil mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan usahanya untuk menumpuk kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, kemiskinan juga muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (*economic overtone*) dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa. Menurut Sriharini (2007, h. 65) kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum maksimal di lihat dari (a) perannya sebagai inovator yang belum memiliki inovasi menyelesaikan permasalahan kemiskinan masyarakat (a) perannya sebagai fasilitator yang masih belum mendampingi masyarakat miskin dalam memanfaatkan bantuan untuk kegiatan usaha produktif (c) perannya sebagai motivator yang masih belum melibatkan dan mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Gampong Leuhan dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya tersebut dikelola oleh BUMG Makmue Beusare dibawah pengawasan Pemerintahan Gampong Leuhan.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintahan Gampong dalam mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan masih belum maksimal di lihat dari (a) perannya sebagai inovator yang belum memiliki inovasi menyelesaikan permasalahan kemiskinan

masyarakat (a) perannya sebagai fasilitator yang masih belum mendampingi masyarakat miskin dalam memanfaatkan bantuan untuk kegiatan usaha produktif (c) perannya sebagai motivator yang masih belum melibatkan dan mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Gampong Leuhan dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya tersebut dikelola oleh BUMG Makmue Beusare dibawah pengawasan Pemerintahan Gampong Leuhan.

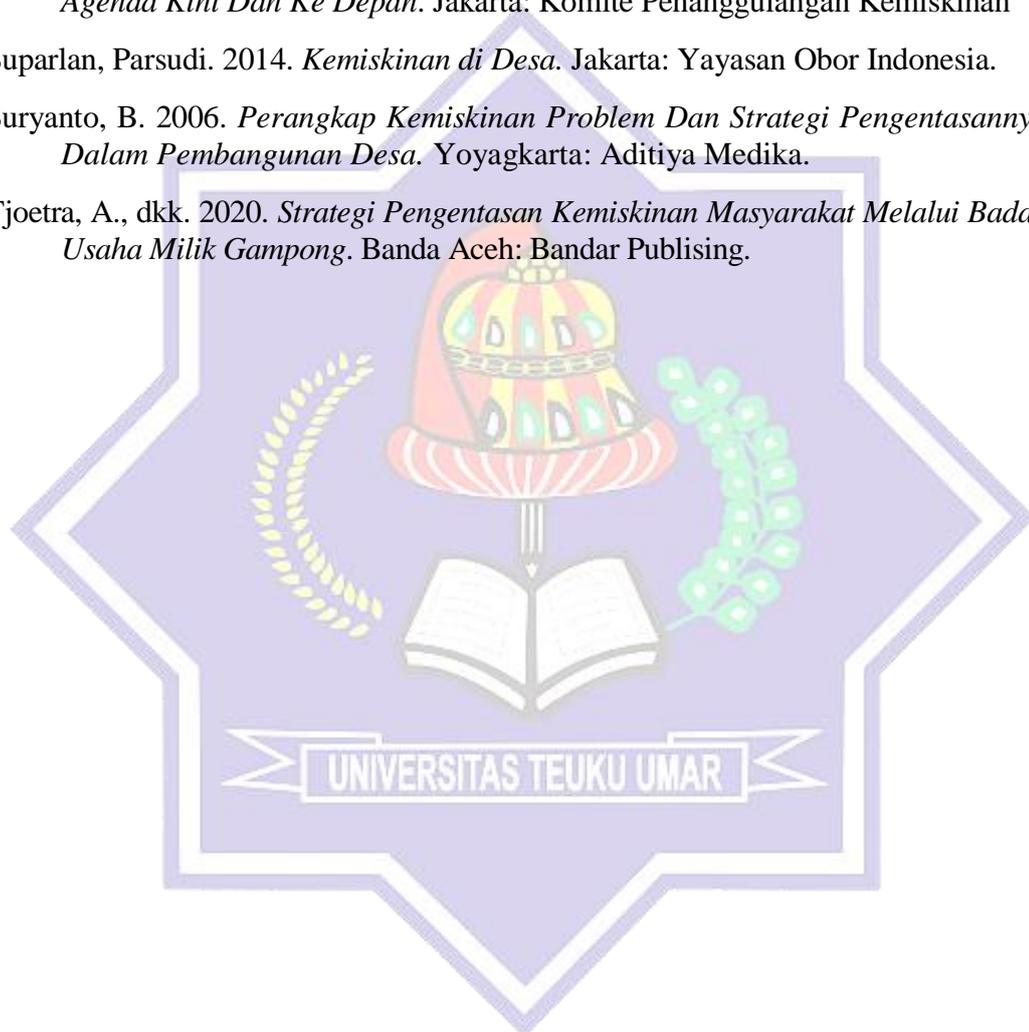
6.2. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran penelitian ini terdiri dari Aparatur gampong untuk menguatkan perannya sebagai fasilitator, inovator dan motivator dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih aktif dalam meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M. O. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Amar, F. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat*. Skripsi Universitas Teuku Umar.
- Arikunto, S. 2018. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chandra, M. A. 2017. *Peran Lurah Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Suatu Study di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal Governance.
- Creswell, J. 2018. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif, N. 2005. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Herlina, N dan Komariah, M. 2017. *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 (2).
- Ismoyo, D 2017. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Khomsan, A. et al. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kodobik, M.E. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Angkringan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Cindirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. AMPD. Yogyakarta.
- Kuncoro, M.. 2015. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mokoginta, H. 2015. *Peranan Pemerintah Desa Mengurangi Angka Kemiskinan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango [Skripsi]* Jurusan Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Moleong, J.L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J.D. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saefuddin, dkk. 2013. *Kemiskinan Penduduk*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, H.H. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Sosio Informa Vol. 3(3): 273-286.

- Silalahi, U. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudradjat. 2010. *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumodiningrat, G. 2013. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan
- Suparlan, Parsudi. 2014. *Kemiskinan di Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryanto, B. 2006. *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditiya Medika.
- Tjoetra, A., dkk. 2020. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong*. Banda Aceh: Bandar Publising.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

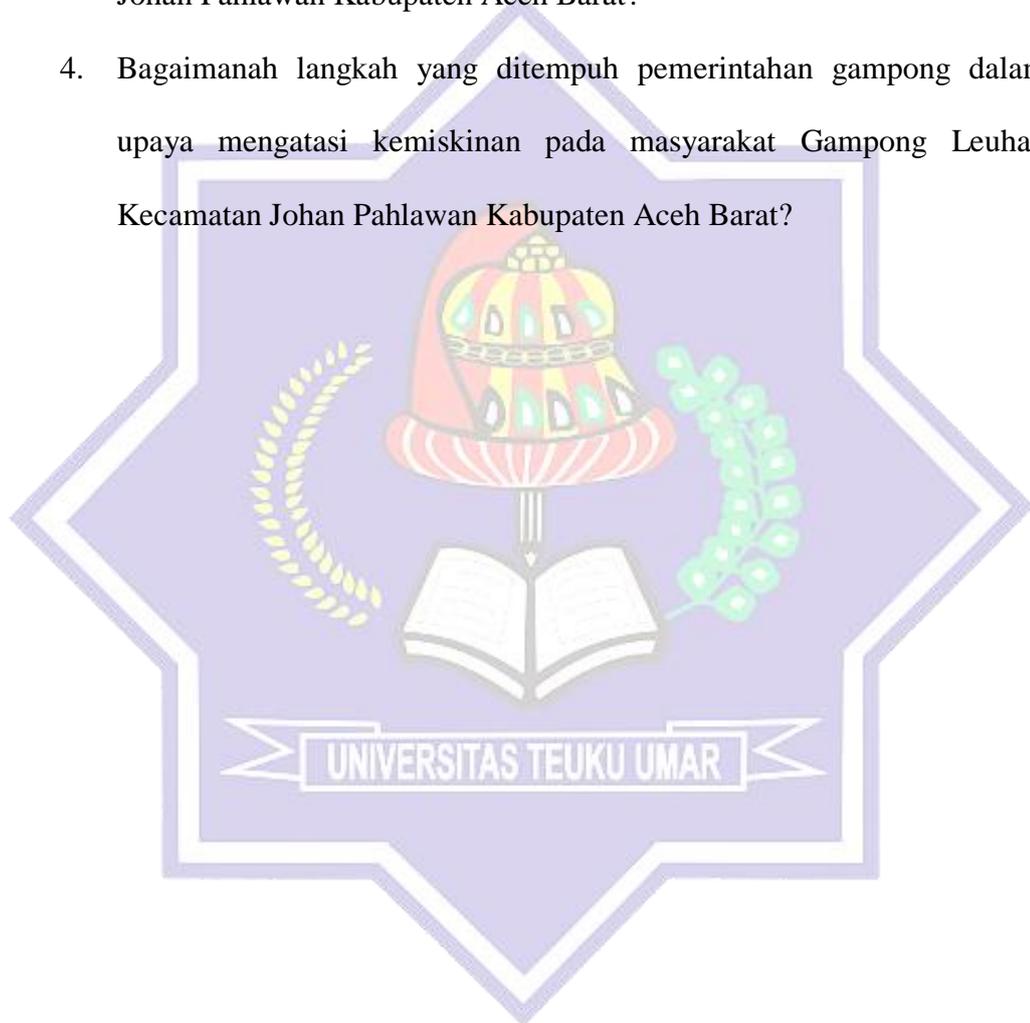
A. Peran Pemerintahan Gampong Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

1. Bagaimana peran pemerintahan gampong sebagai inovator dalam pembuatan perubahan dan menyiapkan penanggulangan kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana peran pemerintahan gampong sebagai fasilitator dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana peran pemerintahan gampong sebagai motivator dalam upaya menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
4. Bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan peran pemerintahan Gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

B. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintahan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

1. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan gampong dalam upaya mengatasi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

2. Apa saja kritik dan saran dari masyarakat terkait upaya mengatasi kemiskinan pada masyarakat di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintahan gampong dalam upaya mengatasi kemiskinan masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
4. Bagaimanah langkah yang ditempuh pemerintahan gampong dalam upaya mengatasi kemiskinan pada masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Photo 1. Wawancara Penulis dengan Keuchik Gampong Leuhan



Photo 2. Wawancara Penulis dengan Sekdes Gampong Leuhan



Photo 3. Wawancara Penulis dengan Tuha Peut Gampong Leuhan



Photo 4. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Leuhan



Photo 5. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Leuhan



Photo 6. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Leuhan



Photo 7. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Leuhan



Photo 8. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Leuhan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 34/UN59.5/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA MAISARAH SARTIKA NIM 1705905010119
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MAISARAH SARTIKA NIM 1705905010119 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Maisarah Sartika NIM 1705905010119 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
 Pada Tanggal 29 Januari 2021
 An. REKTOR
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK.

Basri
 NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 719/UN59.5/PT.01.05/2021

15 Juni 2021

Lampiran :-

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

Keuchik Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat

Di

Tempat _____

Dengan Hormat;

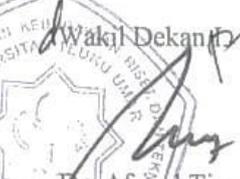
Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Maisarah Sartika
NIM : 1705905010119
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 082276620322
Dosen Pembimbing : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
GAMPONG LEUHAN**

Sekretariat Jalan Putro Ijoe Simpang Gapura No.02 Email: gampongleuhan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 1967 / G.LH / 2020

Keuchik Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menerangkan bahwa:

Nama	: MAISARAH SARTIKA
NIM	: (1705905010119)
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara

Yang namanya tersebut di atas adalah Mahasiswa Universitas Teuku Umar yang telah melakukan Penelitian di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Leuhan, 24 September 2021
Keuchik Gampong Leuhan


SOFIYAN RASYID

